

**ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN BELANJA  
PADA DESA MELATI 2 PERBAUNGAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh**

**Nama : MEGA PERMATASARI**  
**NPM : 1405170392**  
**Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

Nama : MEGA PERMATASARI  
NPM : 1405170392  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN BELANJA PADA DESA MELATI 2 PERBAUNGAN

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

**Tim Penguji**

**Penguji I**

(Dr. IRFAN, SE, MM)

**Penguji II**

(SURYA SANJAYA, SE, MM)

**Pembimbing**

(NOVI FADHILA, SE, MM)

**Panitia Ujian**

**Ketua**

(H. ASULI, S.E., M.M., M.Si.)

**Sekretaris**

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Lengkap : MEGA PERMATASARI  
N.P.M : 1405170392  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI MANAJEMEN  
Judul Penelitian : ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN BELANJA PADA DESA  
MELATI 2 PERBAUNGAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

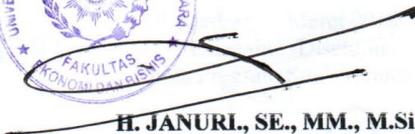
  
NOVI FADHILA., SE., M.M

Diketahui/Disetujui Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

  
FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si

  
H. JANURI., SE., MM., M.Si



**SURAT PERNYATAAN  
PENELITIAN/SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Mega Permatasari  
NPM : 1405170392  
Konsentrasi : Akuntansi Manajemen  
Fakultas : Ekonomi (Akuntansi Perpajakan/Manajemen/IESP)  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
  - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
  - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, ..... 2018  
Pembuat Pernyataan



**Mega Permatasari**

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi

## **ABSTRAK**

### **MEGA PERMATASARI, NPM 1405170392, ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN BELANJA PADA DESA MELATI 2 PERBAUNGAN**

Penyelenggaraan pemerintah daerah tidak lepas dari adanya penggunaan pemanfaatan anggaran serta pendapatan daerah. Dan setiap tahun juga selalu saja pemerintah daerah mempersiapkan perencanaan anggaran atau yang sering disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Karena anggaran pemerintah terkait dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk setiap program dan aktifitas yang menggunakan dana milik masyarakat. Anggaran merupakan alat perencanaan target yang harus tercapai oleh pemerintah, serta sebagai alat pengendalian alokasi sumber dana publik yang disetujui oleh legislatif untuk nanti dibelanjakan.

Tujuan penulis melakukan penelitian untuk menganalisis efisiensi anggaran belanja Desa Melati 2 Perbaungan untuk mengetahui kinerja pemerintahan daerah dalam mengelola dan mengalokasikan anggaran belanja untuk menciptakan sistem akuntansi sektor publik yang baik dengan pendekatan penelitian menggunakan deskriptif dengan menggunakan variabel efisiensi dan anggaran belanja.

Penelitian menggunakan jenis data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan dengan cara mewawancarai pihak – pihak bersangkutan dan mendokumentasikan dokumen – dokumen yang berhubungan. Tempat penelitian dilakukan di kantor Desa Melati 2 Perbaungan dan waktu penelitian dilakukan pada desember sampai dengan maret.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidak efisienan pada anggaran belanja Desa Melati 2 Perbaungan yang berhubungan pada kinerja pemerintahan daerah Desa Melati 2.

**Kata Kunci : Efisiensi, dan Anggaran Belanja**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan banyak kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini di susun ,guna melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Konsentrasi Manajemen

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, semangat, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik bersifat moril maupun materil, oleh karenanya kami ingin menyampaikan ucapan terimakasih antara lain kepada:

1. Yang teristimewa Ayahanda saya Muhammad Yusuf dan Ibunda saya Eka Agus Tina yang tiada hentinya memberikan perhatian dan kasih sayang serta doa restu dan dukungannya, semoga kiranya Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya Rabbal'alamin.
2. Bapak Dr. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri SE, MM., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan SE M.Si selaku Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Dr. Hasrudi Tanjung SE M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih SE,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Novi Fadhila SE, M.M selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun laporan Skripsi ini
9. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Yang terspesial Mardiansyah SE selaku orang yang selalu mendukung semua penyelesaian skripsi ini
11. Fania Imelda, Delvia Sareja, Liyana Izyan Putri, M. Eka Habibie, Aldy Mandala, dan Anang selaku sahabat yang telah memberikan support dan nasehatnya.
12. Ikhsandra Simangunsong, Wan Siti Airia Rahman, Rahmi Farah Meswari, dan Saummy Muthia selaku sahabat yang memberikan arahan dalam penulisan
13. Teman – teman kelas E Pagi Akuntansi yang tidak bias disebutkan satu persatu semoga kita sukses selalu.
14. Dan teman – teman grup agape yang selalu memberikan dukungannya

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak berterimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam mengerjakan skripsi maupun penyusunan laporan skripsi, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan Karunianya kepada kita semua , amin.....

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, Maret 2018

Penulis

**MEGA PERMATASARI**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
1. Tujuan Penelitian .....	9
2. Manfaat Penelitian .....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Uraian Teori .....	11
1. Akuntansi Sektor Publik .....	11
a. Pengertian.....	11
2. Anggaran Sektor Publik .....	14
a. Pengertian.....	14
b. Fungsi, Pengaruh dan Tujuan .....	14
c. Pendekatan Penganggaran.....	15
3. Anggaran Kecamatan dan Desa .....	16
a. Pengertian.....	16
b. Tujuan dan Fungsi.....	17
4. Value For Money .....	19
a. Pengertian.....	19
5. Efisiensi.....	20
a. Pengertian.....	20
b. Pengukuran Efisiensi .....	20
BAB III METODE PENELITIAN .....	25
A. Pendekatan Penelitian .....	25
B. Definisi Operasional Variabel .....	25
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	26
D. Jenis dan Sumber Data .....	27
E. Teknik Pengumpulan Data .....	28
F. Teknik Analisis Data .....	28

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	35
A. Hasil Penelitian .....	35
B. Pembahasan .....	41
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	44
A. Kesimpulan .....	44
B. Saran .....	45
DAFTAR PUSTAKA .....	47

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1 .....	24
-------------------	----

## DAFTAR TABEL

Tabel I-I Tabel Anggaran Belanja .....	7
Tabel II-I Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel III-I Kisi – kisi wawancara .....	26
Tabel III-1 Tabel Waktu Penelitian .....	27

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga – lembaga pemerintahan di Indonesia dan departemen departemen dibawahnya dengan tujuan sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pada saat ini sektor publik dituntut untuk memperhatikan kualitas dan profesionalisme serta memperhatikan *value for money*.

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokrasi menjadi satu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokrasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktifitasnya. Yang dimaksud *value for money* adalah ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan – penggunaan sumber daya alam, artinya bahwa penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Krisis yang mempengaruhi situasi ekonomi saat ini menyebabkan pemerintah di Negara – Negara seluruh dunia memperbaiki proses mereka dalam hal performa daya guna dan efisiensi perekonomian. Dalam pengertian ini analisa perbandingan dari efisiensi sektor publik adalah poin awal dalam mempelajari peran tugas dari efisiensi, efektifitas dan performa yang berhubungan dengan perekonomian pemerintahan dari penggunaan sumber daya oleh

manajemen publik untuk mendapatkan keobjektifan dari pemulihan ekonomi dan kepentingan pengembangan perekonomian nasional pada jangka menengah dan jangka panjang.

Penyelenggaraan pemerintah daerah tidak lepas dari adanya penggunaan pemanfaatan anggaran serta pendapatan daerah. Dan setiap tahun juga selalu saja pemerintah daerah mempersiapkan perencanaan anggaran atau yang sering disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Karena anggaran pemerintah terkait dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk setiap program dan aktifitas yang menggunakan dana milik masyarakat. Anggaran merupakan alat perencanaan target yang harus tercapai oleh pemerintah, serta sebagai alat pengendalian alokasi sumber dana publik yang disetujui oleh legislatif untuk nanti dibelanjakan.

Pada umumnya setiap perusahaan berupaya seoptimal mungkin mencapai tujuan yang telah mereka rencanakan, baik itu tujuan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam kegiatan perusahaan, semua bagian seperti pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan keuangan akan menjadi satu kesatuan kerja yang harus saling mendukung dalam mencapai tujuannya, maka setiap perusahaan senantiasa berusaha untuk menyusun strategi – strategi sebagai petunjuk dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerjanya. (Julita, 2012)

Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan barang. Secara garis besar anggaran merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan. Sehingga dalam proses penyusunan

dibutuhkan data dan informasi, baik yang bersifat terkendali maupun yang bersifat tak terkendali untuk dijadikan bahan taksiran. Hal ini disebabkan karena data dan informasi tersebut akan berpengaruh terhadap keakuratan taksiran dalam proses perencanaan anggaran (Julita, 2012).

Setiap pemerintahan memiliki suatu anggaran pendapatan dan belanja, baik tingkat pusat maupun daerah. Perencanaan suatu anggaran umumnya meliputi masa waktu satu tahun. Faktor distribusi, stabilisasi, dan alokasi sangat perlu diperhatikan dalam penyusunan suatu anggaran. Penyusunan anggaran memiliki fungsi yang bersifat integratif dan bersinergi antar komponen dalam pengalokasian anggaran. Dalam hal fungsi anggaran menjadi begitu penting untuk dapat terlaksananya pembangunan ekonomi suatu daerah. Di sisi lain anggaran memiliki banyak kelemahan yang bersifat umum, baik jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Selain kelemahan tersebut penyusunan suatu anggaran akan menghadapi berbagai kenujuda, seperti *political context*, *legal context*, *economic conditions*, dan *historical context*.

Penggunaan anggaran dalam pembangunan diharapkan memberikan manfaat tidak saja untuk meningkatkan pendapatan, namun juga diharapkan dapat memberikan ruang gerak ekonomi yang lebih kondusif dan menyentuh akar masalah yang faktual dalam masyarakat.

Dalam setiap organisasi baik organisasi bisnis maupun organisasi pemerintah dituntut agar menggunakan setiap sumber daya secara efisien dan efektif. Tidak terkecuali dengan penggunaan anggaran. Setiap daerah diberikan otorisasi penuh dalam menggunakan anggarannya masing – masing. Fungsi

otorisaasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasikan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan

Belakangan ini salah satu bagian terkecil dari unit pemerintahan menjadi perhatian publik, contohnya desa. Dikarenakan keputusan pemerintah pusat yang memberikan dana bantuan desa dengan jumlah nominal yang cukup besar. Sehingga setiap desa yang diberikan bantuan itu pun dituntut untuk menggunakan dana atau anggaran untuk tujuan tertentu dengan sebaik baiknya. Dengan kata lain efektif dan efisien. Namun, dalam prakteknya masih banyak desa yang belum optimal dan maksimal dalam pengaplikasian dana tersebut. Salah satu yang menjadi alasan adalah masih ada beberapa unit desa yang masih belum membuat keputusan yang tepat berhubungan dengan penyerapan dan pengalokasian anggaran yang kurang tepat sasaran. Sehingga dikategorikan sebagai realisasi yang tidak efisien.

Kemampuan pemerintahan desa dalam mengelola anggaran berhubungan dengan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manager dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik, akuntabilitas bukan sekedar kemampuan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif. *Value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak hanya dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama – sama.

Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu : ekonomis (hemat dan cermat) dalam pengadaan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. (Nurmala Sari, dkk, 2015, hal 17)

Ekonomis, merupakan perolehan masukan (*input*) dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah. Konsep ini menekankan terkait dengan seberapa besar organisasi sektor publik dapat meminimalisir penggunaan sumber daya yang digunakan, dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif

Efisiensi berbicara mengenai *input* dan *output*. Efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah – rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar – besarnya.

Efektifitas terkait dengan hubungan Antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektifitas merupakan hubungan Antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Karena *output* yang dihasilkan organisasi sektor publik lebih banyak bersifat *output* tidak berwujud yang tidak mudah dikuantifikasi, maka pengukuran efektifitas sering menghadapi kesulitan.

Kesulitan dalam pengukuran efektifitas tersebut adalah karena pencapaian hasil sering tidak bisa diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi jangka panjang setelah program berakhir, sehingga ukuran efektifitas biasanya dinyatakan dalam bentuk pernyataan saja. *Value for money* menghendaki organisasi bisa memenuhi prinsip efisiensi dan efektifitas tersebut secara bersama – sama. Dengan pengertian lain, *value for money* menghendaki organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dengan biaya yang lebih rendah. (Nurmala Sari,dkk, 2015, hal 19)

Dapat disimpulkan efektifitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang ditetapkan. Efektifitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak, sangat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut bagaimana cara melaksanakannya, dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu. Hal ini lebih menekankan pada penyelesaian tugas yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas kerja berhubungan dengan hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Satu hal yang perlu digaris bawahi efektifitas kerja tidak dapat dipisahkan dengan efisiensi kerja. Efisiensi kerja berhubungan dengan biaya, tenaga, mutu dan pemikiran. Jadi efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

**TABEL I – 1. ANALISIS ANGGARAN BELANJA PADA DESA MELATI2 PERBAUNGAN**

TAHUN	TARGET	REALISASI	TINGKAT EFISIENSI	KETERANGAN
2013	Rp 156,229,671	Rp 156,229,671	100%	Tidak efisien
2014	Rp 156,229,674	Rp 156,229,674	100%	Tidak efisien
2015	Rp 1,039,218,452	Rp 1,039,218,452	100%	Tidak efisien
2016	Rp 1,249,020,979	Rp 1,249,020,979	100%	Tidak efisien
2017	Rp 1,743,569,428	Rp 1,743,569,428	100%	Tidak efisien

Sumber : Arsip data Desa Melati2 Perbaungan

Berdasarkan table I-1 dapat dijelaskan bahwa fenomena penelitian pada Desa Melati2 adalah ketidak efisienan. Maka hal ini akan berdampak bahwa kinerja desa dalam menggunakan anggaran. Perlunya desa untuk mengevaluasi kembali pengalokasian dana anggaran belanja tersebut sangat penting guna meningkatkan efesiensi anggaran. Fenomena tersebut sesuai dengan penelitian Imanuel Pangkey dan Sherly Pinatik 2014

Pengalokasian yang lebih terencana akan meminimalisir *input* dan memaksimalkan *output*. Sehingga dana – dana tadi bisa dipakai untuk kepentingan lain tentunya dengan mengutamakan skala prioritas. Sehingga dengan dana yang minimalis akan menghasilkan pembangunan daerah yang lebih tersusun.

Pengaruh anggaran publik berhubungan dengan akuntabilitas eksekutif organisasi. Konflik yang terjadi dalam penentuan anggaran sangat berpengaruh terhadap kapabilitas eksekutif akan menggunakan daftar tahunan tentang pengeluaran dan pendapatan beserta tujuan aktifitasnya. Jadi, karakter anggaran

adalah keseragaman, keseluruhan transaksi organisasi, keteraturan penyerahan rancangan anggaran per tahunnya, akurasi prakiraan pendapatan serta pengeluaran yang didasari oleh persetujuan/konsensus, dan terpublikasi. Proses penyusunan maupun pengesahan anggaran dapat dipublikasikan ke masyarakat. Jika kita perhatikan tujuan anggaran dapat dirumuskan sebagai alat akuntabilitas, alat manajemen, dan instrumen kebijakan ekonomi. Proses akhir penyusunan anggaran merupakan hasil dari persetujuan politik, termasuk item pengeluaran yang harus disetujui para legislator. Dalam hal ini, unit kerja organisasi merupakan pelaksana pengelolaan dana dan program. (Bastian, 2010, hal 192)

Untuk itu diperlukannya anggaran yang efisien agar guna untuk menilai kinerja pemerintahan. Dan juga bagi masyarakat transparansi anggaran yang efisien diperlukan guna untuk mengetahui pemerintah dalam menggunakan anggaran dengan sebaik – baiknya serta tujuan yang telah tercapai dalam penggunaan anggaran tersebut.

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Analisis Efisiensi Anggaran Belanja pada Desa Melati2 Perbaungan**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Adanya ketidak efisienan pada anggaran belanja pada laporan anggaran Desa Melati 2 Perbaungan.

2. Adanya penyebab ketidak efisienan dalam anggaran belanja pada Desa Melati 2 Perbaungan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa anggaran belanja pada Desa Melati 2 Perbaungan belum efisien?
2. Bagaimana cara untuk meningkatkan efisiensi anggaran belanja pada Desa Melati 2 Perbaungan?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **a. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka peneliti menyajikan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab anggaran belanja pada Desa Melati 2 Perbaungan belum efisien.
2. Untuk mengetahui cara meningkatkan efisiensi anggaran belanja pada Desa Melati 2 Perbaungan.

#### **b. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam menambah pengetahuan dan memperluas wawasan baik teori maupun aplikasinya.
2. Bagi Desa dapat dijadikan sebagai saran untuk perbaikan dalam menggunakan anggaran belanja langsung dimasa yang akan datang

3. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi maupun bahan kajian bagi penelitian.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Akuntansi Sektor Publik**

###### **a. Pengertian**

Akuntansi sektor publik merupakan alat penyediaan informasi baik bagi pemerintah maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategi, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja. (Renyowijoyo, 2008, hal 23)

Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktifitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak – pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga – lembaga tinggi Negara dan departemen – departemen dibawahnya.

Akuntansi sektor publik di Indonesia pada berbagai bidang yakni sebagai berikut.

- 1) Akuntansi Pemerintah Pusat
- 2) Akuntansi Pemerintah Daerah
- 3) Akuntansi Desa
- 4) Akuntansi Tempat Ibadah: Masjid, Gereja, Pura, Wihara
- 5) Akuntansi LSM (Lembaga Sosial Masyarakat)

- 6) Akuntansi Yayasan
- 7) Akuntansi Pendidikan: Sekolah, Perguruan Tinggi
- 8) Akuntansi Kesehatan: Puskesmas, Rumah Sakit (Wiratna, 2015, hal 1)

b. Sifat dan Karakteristik

Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan *turbulence*. Komponen lingkungan yang memengaruhi organisasi publik antara lain faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi.

- 1) Faktor Ekonomi yang memengaruhi organisasi publik antara lain:
  - a) Pertumbuhan ekonomi
  - b) Tingkat inflasi
  - c) Pertumbuhan pendapatan per kapita
  - d) Struktur produksi
  - e) Tenaga kerja
  - f) Arus modal dalam negeri
  - g) Cadangan devisa
  - h) Nilai tukar mata uang
  - i) Utang dan bantuan luar negeri
  - j) Infrastruktur
  - k) Teknologi
  - l) Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi
  - m) Sektor informal

## 2) Faktor Politik

Faktor Politik yang memengaruhi sektor publik antara lain :

- a) Hubungan Negara dan masyarakat
- b) Legitimasi pemerintah
- c) Tipe rezim yang berkuasa
- d) Ideologi Negara
- e) Elit politik dan massa
- f) Jaringan internasional
- g) Kelembagaan

## 3) Faktor Kultural

Faktor kultural yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain:

Keagamaan suku, ras, agama, Bahasa dan budaya

Sistem nilai di masyarakat

- a) Historis
- b) Sosiologi masyarakat
- c) Karakteristik masyarakat
- d) Tingkat Pendidikan

## 4) Faktor Demografi

Faktor demografi yang mempengaruhi organisasi sektor publik Antara lain:

- a) Pertumbuhan penduduk
- b) Struktur usia penduduk
- c) Migrasi
- d) Tingkat kesehatan (Mardiasmo, 2009, hal 3-4)

## **2. Anggaran Sektor Publik**

### **a. Pengertian**

Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan barang. Secara garis besar anggaran merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan. Sehingga dalam proses penyusunan dibutuhkan data dan informasi, baik yang bersifat terkendali maupun yang bersifat tak terkendali untuk dijadikan bahan taksiran. Hal ini disebabkan karena data dan informasi tersebut akan berpengaruh terhadap keakuratan taksiran dalam proses perencanaan anggaran (Julita, 2012).

Secara umum, anggaran diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk suatu periode dimasa depan yang disajikan dalam bentuk angka – angka. Selain itu, anggaran (*budget*) juga dapat didefinisikan sebagai hasil perencanaan yang berkaitan dengan berbagai kegiatan secara terpadu yang dinyatakan dalam satuan uang selama jangka waktu tertentu. Dapat pula dinyatakan bahwa anggaran merupakan sederetan daftar atau pernyataan – pernyataan terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. ( Bastian, 2015, hal 269)

Secara umum, anggaran diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk suatu periode dimasa depan yang disajikan dalam bentuk angka – angka. Selain itu, anggaran (*budget*) juga dapat didefinisikan sebagai hasil perencanaan yang berkaitan dengan berbagai kegiatan secara terpadu yang dinyatakan dalam satuan uang selama jangka waktu tertentu.

Dapat pula dinyatakan bahwa anggaran merupakan sederetan daftar atau pernyataan – pernyataan terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. ( Bastian, 2015, hal 269)

b. Fungsi, Pengaruh, dan Tujuan Anggaran Publik

Anggaran berfungsi sebagai berikut:

- 1) Anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja.
- 2) Anggaran merupakan cetak biru aktifitas yang akan dilaksanakan dimasa mendatang.
- 3) Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan serta bawahan.
- 4) Anggaran sebagai alat pengendalian kerja
- 5) Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif serta efisien dalam pencapaian visi organisasi. (Bastian, 2010, hal 191)

Pengaruh anggaran publik berhubungan dengan akuntabilitas eksekutif organisasi. Konflik yang terjadi dalam penentuan anggaran sangat berpengaruh terhadap kapabilitas eksekutif akan menggunakan daftar tahunan tentang pengeluaran dan pendapatan beserta tujuan aktifitasnya. Jadi, karakter anggaran adalah keseragaman, keseluruhan transaksi organisasi, keteraturan penyerahan rancangan anggaran per tahunnya, akurasi prakiraan pendapatan serta pengeluaran yang didasari oleh persetujuan/konsensus, dan terpublikasi. Proses penyusunan maupun pengesahan anggaran dapat dipublikasikan ke masyarakat. Jika kita perhatikan tujuan anggaran dapat dirumuskan sebagai alat akuntabilitas, alat manajemen, dan instrumen kebijakan ekonomi. Proses akhir penyusunan anggaran merupakan

hasil dari persetujuan politik, termasuk item pengeluaran yang harus disetujui para legislator. Dalam hal ini, unit kerja organisasi merupakan pelaksana pengelolaan dana dan program. (Bastian, 2010, hal 192)

c. Pendekatan penganggaran pada sektor publik

Sistem perencanaan anggaran publik berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan manajemen sektor publik dan tuntutan yang muncul dalam masyarakat. Pada dasarnya terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik. Pendekatan – pendekatan tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Pendekatan tradisional
- 2) Pendekatan *new public management*, yaitu:
  - a) Pendekatan kinerja
  - b) Pendekatan penganggaran program
  - c) Pendekatan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu (*planning, programming, and budgeting system – PPBS*) ( Halim, Kusufi, 2012, hal 54)
  - d) Pendekatan anggaran berbasis nol ( *zero based budgeting – ZBB*)

### **3. Anggaran Kecamatan dan Desa**

a. Pengertian

Anggaran kecamatan dan desa merupakan keseluruhan anggaran yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan kecamatan dan desa, masyarakat umum, dan semua hal yang menunjang operasional organisasi kecamatan dan desa.

Kebutuhan tentang anggaran dalam organisasi kecamatan dan desa ini digunakan untuk membiayai setiap kegiatan. ( Bastian, 2015, hal 269)

b. Tujuan dan Fungsi Anggaran Kecaamatan dan Desa

Tujuan anggaran kecamatan dan desa adalah memenuhi anggaran kebutuhan pelaksanaan program dan sektariat kantor agar kualitas hidup masyarakat kecamatan dan desa tercapai.

Fungsi anggaran desa adalah sebagai berikut :

1) Sebagai Alat Perencanaan

Anggaran kecamatan dan desa merupakan alat perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi kecamatan dan desa, yaitu tercapainya kualitas hidup masyarakat yang layak. Anggaran kecamatan dan desa dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh organisasi kecamatan dan desa, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja organisasi kecamatan dan desa tersebut.

- a) Merencanakan berbagai program dan kegiatan pelayanan kecamatan dan desa untuk mencapai tujuan organisasi kecamatan dan desa serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya.
- b) Mengalokasikan dana ke berbagai program dan kegiatan pelayanan kecamatan dan desa yang telah disusun.
- c) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi pembangunan kecamatan dan desa.

## 2) Sebagai Alat Pengendalian

Sebagai alat pengendalian, anggaran dibuat agar uang kas ada ketika dibutuhkan. Tanpa anggaran, organisasi kecamatan dan desa tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran.

## 3) Sebagai alat kebijakan fiskal

Sebagai alat kebijakan fiskal, dapat diperkirakan apakah anggaran cukup atau tidak untuk membiayai program dan kegiatan organisasi kecamatan dan desa.

## 4) Sebagai Alat Politik

Sebagai alat politik, anggaran dibuat dengan mempertimbangkan alokasi mana yang disepakati masyarakat pada pertemuan – pertemuan desa.

## 5) Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi

Anggaran kecamatan dan desa merupakan alat komunikasi dan koordinasi antarbagian dalam organisasi, serta Antara organisasi dan masyarakat. Hal ini dimulai sejak penyusunan anggaran kecamatan dan desa yang mengedepankan partisipasi masyarakat.

## 6) Sebagai Alat Penilaian Kinerja.

Sebagai alat penilaian kinerja, anggaran yang dibuat akan menunjukkan uang yang dikeluarkan, yaitu berapa dan bagaimana kinerja yang dihasilkannya. Kinerja pengelola organisasi kecamatan dan desa dinilai berdasarkan berapa yang berhasil dicapai dikaitkan dengan anggaran kecamatan dan desa yang telah ditetapkan.

#### 7) Sebagai alat Motivasi

Anggaran kecamatan dan desa dapat digunakan sebagai alat memotivasi pejabat pelaksana teknis untuk bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target serta tujuan organisasi kecamatan dan desa yang telah ditetapkan.

#### 8) Sebagai Alat Menciptakan Ruang Publik

Dalam penyusunannya, anggaran kecamatan dan desa harusnya melibatkan aparat organisasi kecamatan desa dan seluruh elemen masyarakat yang ada. Hal ini dilakukan agar aspirasi kebutuhan riil masyarakat tersampaikan sehingga arah pembangunan selaras dengan kebutuhan masyarakat. (Bastian, 2015, hal 271)

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 113 Tahun 2014

#### c. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bab I Pasal 1 yang terdiri dari 23 ayat memuat tentang ketentuan umum. Dilanjutkan pada Bab II mengenai Asas Pengelolaan Keuangan Desa.

Bunyi dari Bab II pasal 2 ayat satu dan dua ini adalah sebagai berikut;

##### Pasal 2

- Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

## Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Kepala Desa memiliki peran tertinggi dalam mengelola keuangan desanya. Oleh karena itu ialah yang juga harus bertanggungjawab atas segala arah kebijakan penggunaan uang desa tersebut. Hal itu sebagaimana tertuang pada pasal 3 yang terdiri dari tiga ayat. Berikut ini kutipannya;

### Pasal 3

- Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

- Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- 1) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- 2) menetapkan PTPKD;
- 3) menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- 4) menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- 5) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD. Mengenai ketentuan tentang PTPKD pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ini, baik itu yang meliputi

Sekretaris Desa, Bendahara, Kepala Seksi, dan perangkat lainnya, diatur pada pasal ke-4 sampai dengan pasal ke-7.

#### APBDesa

Bab IV mengatur tentang APBDesa yang antara lain menyatakan bahwa PBDesa terdiri Bagian ke-1; Pendapatan Desa, Bagian Ke-2: Belanja Desa, dan juga Bagian ke-3: Pembiayaan Desa.

Pasal 9 dan pasal 10 menjadi bagian pertama yang berisi dari beberapa ayat sebagai pengatur tentang pendapatan desa. Sedangkan untuk bagian kedua yang memuat tentang belanja desa terdapat banyak pasal yang mengaturnya. Yaitu dari pasal 12 terdiri dari 2 ayat, pasal 13 ada 3 ayat, pasal 14 membawahi 3 ayat, pasal 15 terdapat 4 ayat, pasal 16 2 ayat, pasal 17 ada 6 ayat, pasal 18 tujuh ayat, dan pasal 19 juga terdiri dari tujuh ayat.

#### Pengelolaan Keuangan

Bab V merupakan hal yang mengatur tentang pengelolaan, di mana pada bagian pertama diatur mengenai perencanaan. Dimulai dari pasal 20 hingga pasal 23 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

#### Perencanaan

Bagian ke-1 yang berisi tentang perencanaan ini lebih dominan dikerjakan oleh sekretaris desa. Hal tersebut sebagaimana diatur pada pasal 20 ini;

#### Pasal 20

- Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

- Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

#### Pelaksanaan

Pasal 21, pasal 22, dan pasal 23 masih mengatur tentang perencanaan. Sementara untuk pasal 24-nya sudah menjadi bagian kedua yang berisi mengenai pelaksanaan. Berikut adalah salah satu kutipannya;

#### Pasal 24

- Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
- Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pada bagian kedua yang mengatur tentang pelaksanaan ini ada banyak pasal yang tertera, yaitu dimulai pada pasal 24 sebagaimana terutip di atas, hingga pasal 34.

#### Penatausahaan

Untuk pasal 35 dan pasal 36 pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, berisi tentang penatausahaan keuangan desa.

Selanjutnya pada pasal 37 menjadi bagian keempat yang memuat tentang pelaporan.

#### Pasal 24

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

- Laporan semester pertama; dan
- Laporan semester akhir tahun.
- Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf berupa laporan realisasi APBDesa
- Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan
- Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

#### Pertanggungjawaban

Bagian kelima berisi mengenai pertanggungjawaban yang diatur dalam pasal 38 hingga pasal 43.

#### Pembinaan dan Pengawasan

#### Pasal 44

- Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.

- Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

#### Pasal 45

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ini merupakan hal penting karena berhubungan dengan uang, dimana akuntabilitas dan transparansi harus diterapkan demi mendapatkan keadilan dan kesejahteraan bersama, baik pihak pemerintah pun warganya. Karena itu, seyogyanya ada banyak pihak yang tetap kritis dalam merunut hal-hal yang telah diatur tersebut agar tak terjadi penyimpangan di kemudian hari.

## **4. Value For Money**

### a. Pengertian

*Value for money* merupakan tuntutan baru transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi sektor publik. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik dalam menjalankan aktifitasnya. *Value for money* menghendaki organisasi sektor publik dalam memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektifitas tersebut secara bersama – sama yang berarti mampu

menggunakan uang publik (anggaran) secara hemat, cermat, dan tepat untuk target serta sasaran dan tujuan. (Nurmala Sari Eka dkk, 2015, hal 17)

*Value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja, tapi harus mempertimbangkan *input*, *output* dan *outcome* secara bersama – sama. tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. (Nurmala Sari Eka dkk, 2015, hal 17)

## **5. Efisiensi**

### **a. Pengertian**

Efisiensi merupakan pencapaian keluar (output) yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan keluaran/masukan (output/input) yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. (Renyowijoyo, 2008, hal 7)

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan melakukan perbandingan Antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu

dapat dicapai dengan penggunaan sumber dana dan daya yang serendah – rendahnya (Mardiasmo, 2009, hal 132)

b. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi adalah hubungan Antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan sebuah kegiatan/ aktifitas dengan sumber daya (*input*) yang digunakan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah – rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar – besarnya (*spending well*). Efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{output}}{\text{input}} \times 100\%$$

(Nordiawan, Hertianti, 2010 hal 161)

Adapun menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut:

Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.

- 1) Jika hasil pencapaian Antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.
- 2) Jika hasil pencapaian Antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien.
- 3) Jika hasil pencapaian Antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien..
- 4) Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

**TABEL II-1 PENELITIAN TERDAHULU**

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
Melania Rampengan, Grace B. Nangoi, dan Hendrik Manossoh	Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado	Efektifitas, efisiensi, dan Anggaran Belanja	Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat efektifitas berfluktuasi setiap tahunnya dan tingkat efisiennya sudah sangat bagus	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 03 Tahun 2016
Imanuel Pangkey dan Sheryl Pinatik	Analisis Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara	Efektifitas, Efisiensi, dan Anggaran Belanja Langsung	Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat efektifitas anggaran belanja langsung setiap tahunnya tidak efektif dan tidak efisien	Jurnal Emba Vol 3 No.04 2015
Rusita Untari	Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang	Efektifitas, Efisiensi, dan Anggaran Belanja Langsung	Hasil Penelitian menyatakan bahwa tingkat efektifitas dan efisiensi pada anggaran belanja langsung sudah sangat baik	Jurnal Universitas Dian Nuswantoro

## **B. Kerangka Berfikir**

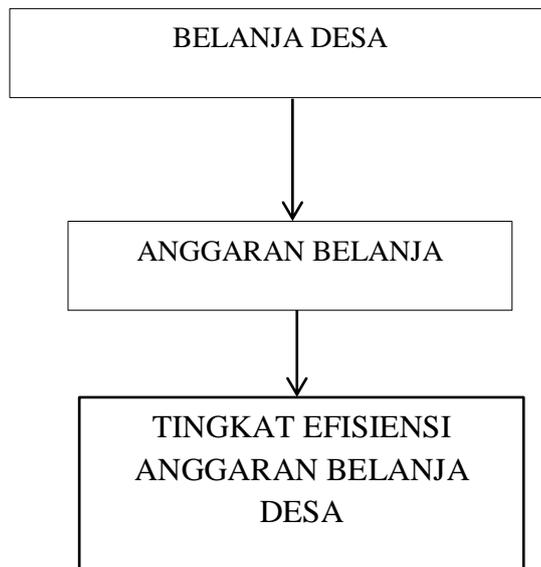
Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan pemerintah dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik, akuntabilitas, bukan sekedar bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien dan efektif. (Nurmala Sari Eka,dkk, 2015, hal 17)

Untuk mengetahui bagaimana tingkat efisiensi pada instansi pemerintahan maka tahap yang harus dilakukan adalah membandingkan antara target anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja dan kemudian mencocokkannya dengan indikator yang telah ditetapkan. Hasil dari perbandingan berhubungan dengan kinerja pemerintahan yang akan dianggap layak atau belum layak dalam mengelola dan mengendalikan anggaran.

Setiap unit pemerintahan bahkan dari yang terkecil sekalipun seperti desa harus diukur tingkat efisiensinya karena jika dari mulai sub unit terkecil sudah memiliki kinerja yang bagus makanya semakin keatas pemerintahan juga semakin bagus.

Desa adalah salah satu bagian terkecil dalam pemerintahan daerah. Desa adalah salah satu tempat yang tepat untuk digunakan dalam penelitian karena belakangan ini dana desa yang berasal dari pemerintah pusat. Semakin besar anggaran yang masuk maka akan menjadi pertanyaan baru apakah pemerintah desa mampu dalam mengalikasikan dan mengelola anggaran belanja yang ada.

Berdasarkan kerangka berfikir tersebut maka peneliti menggambarkan kerangka berfikir penelitian ini sebagai berikut :



**Gambar II-1 Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan memberikan penelitian yang bertujuan memberikan uraian atau gambaran mengenai fenomena atau gejala sosial yang diteliti dengan cara mendeskripsikan variabel mandiri, baik satu variabel ataupun lebih (independen) berdasarkan indikator dan variabel yang diteliti tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antar variabel yang diteliti guna untuk eksplorasi atau klasifikasi dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.

#### **B. Definisi Operasional Variabel**

Berdasarkan perumusan masalah dan metode analisis, maka variabel yang digunakan adalah :

1. Efisiensi menunjukkan kemampuan desa dalam menggunakan anggaran seminimal dan memperoleh tujuan tertentu serta hasil yang sebaik baiknya dengan cara membandingkan antara target anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja.
2. Anggaran belanja adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya

dinyatakan dalam satuan barang. Secara garis besar anggaran merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan.

**Tabel III - 1**

**Kisi – Kisi Wawancara**

NO	KOMPONEN	ITEM PERTANYAAN
1	Efisiensi	3
2	Anggaran Belanja	3

**C. Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat Penelitian : Penelitian ini dilakukan langsung pada Kantor Desa Melati 2 Perbaungan yang beralamat di Jalan Besar Pasar VI, Desa Melati2, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.

Waktu Penelitian : Direncanakan dimulai pada bulan Desember 2017 sampai dengan bulan April 2018

**Tabel III - 2 Tabel Waktu Penelitian**

Jenis Kegiatan	2017						2018			
	November			Desember			Januari			Maret
	2	3	4	1	3	4	1	2	3	1
Pengajuan judul										
Pra riset										
Penyusunan proposal										
Bimbingan proposal										
Seminar Proposal										
Sidang Proposal										

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data : Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).
2. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Penelitian ini mendapatkan data yang bersumber dari wawancara dan laporan keuangan.

##### 1. Wawancara

- a). Dilakukan kepada pihak – pihak yang bersangkutan yang memiliki otorisasi untuk menjawab seperti Kepala Desa dan Sekertaris Desa

##### 2. Dokumen

a). Laporan realisasi anggaran berupa laporan yang berisi data target anggaran beserta realisasi anggaran

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, dan dokumentasi.

1. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.
2. Dokumentasi merupakan mengambil dokumen yang berisi informasi hal – hal yang berhubungan dengan penelitian dan dengan tujuan untuk memberikan informasi baru.

### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.

Metode analisis data pada penelitian ini adalah mendokumentasikan data yang ada dan membuatnya dalam bentuk informasi.

Langkah – langkah dalam melakukan analisa data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mengklasifikasikan data Desa berupa laporan realisasi anggaran.

- 2) Mengidentifikasi masalah yang terdapat pada laporan realisasi anggaran Desa Melati 2.
- 3) Menganalisis masalah dan membuatnya menjadi rumusan masalah.
- 4) Menarik kesimpulan dari permasalahan yang ada.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Desa Melati 2 Perbaungan**

###### **a. Sejarah Singkat Desa Melati 2 Perbaungan**

Sejarah terbentuknya Desa Melati 2 adalah perjuangan Siswoyuno. Desa yang sekarang dinamakan Desa Melati ini adalah tanah konsesi dari Undang – Undang Darurat 1948. Tahun 1948 terbentuklah nama Kampung Melati, dimana waktu itu Bapak Siswoyuno menanam bunga melati dan disekitar perkampungan banyak tumbuh melati hutan.

Berdasarkan letak geografis wilayah, Desa Melati 2 berada antara  $6^{\circ}30'17.40'' - 6^{\circ}31'50,77''$  dan  $110^{\circ}42'55.37''$  BT. Desa Melati 2 terletak di kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Secara topografi Desa Melati 2 relatif datar dengan rata – rata ketinggian 2 mdpl, suhu  $28^{\circ} - 30^{\circ}c$ , curah hujan 1250 – 2000 mm dan kelembapan udara 60 – 70 % sehingga Desa Melati 2 dikategorikan daerah dataran rendah. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, antara lain fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lain – lain dengan panjang 258km, dengan tata guna lahan terdiri dari :

Lahan Darat :

- Pemukiman :170 Ha

Lahan sawah :

- Sawah Irigasi Teknis : 980 Ha
- Tegalan : 0,4 Ha
- Kolam : 5 Ha
- Kantor Desa : 1600 M<sup>2</sup>

Dengan luas penduduk mencapai 15.850 jiwa

## **b. Visi dan Misi Desa**

### **Visi**

Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

### **Misi**

1. Meningkatkan mental spiritual, perilaku hidup dengan menghayati dan mengamalkan pancasila serta melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan hak azasi manusia (HAM), demokrasi, meningkatkan kesetiakawanan social dan kegotong royongan serta pembentukan watak bangsa yang selaras, serasi dan seimbang.
2. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan yang diperlukan, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta pendapatan keluarga.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, serta upaya peningkatan pemanfaatan pekarangan melalui halaman asri, teratur, indah dan nyaman (hatinya) PKK sandang dan perumahan serta tata laksana rumah tangga yang sehat.

4. Meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup serta membiaskan hidup berencana dalam semua aspek kehidupan dan perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung.

5. Meningkatkan pengelolaan gerakan PKK baik kegiatan pengorganisasian maupun pelaksanaan program – programnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

## **2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Desa Melati 2 Perbaungan Tahun 2013 – 2017**

Laporan realisasi anggaran belanja Desa Melati 2 Perbaungan adalah laporan yang menyajikan realisasi dan target anggaran belanja dari tahun 2013 - 2017. Laporan realisasi anggarannya adalah sebagai berikut :

TAHUN	TARGET	REALISASI	TINGKAT EFISIENSI	KETERANGAN
2013	Rp 156,229,671	Rp 156,229,671	100%	Tidak efisien
2014	Rp 156,229,674	Rp 156,229,674	100%	Tidak efisien
2015	Rp 1,039,218,452	Rp 1,039,218,452	100%	Tidak efisien
2016	Rp 1,249,020,979	Rp 1,249,020,979	100%	Tidak efisien
2017	Rp 1,743,569,428	Rp 1,743,569,428	100%	Tidak efisien

Sumber : Arsip data Desa Melati2 Perbaungan

Pada tabel laporan realisasi anggaran belanja Desa Melati 2 tersebut menjelaskan bahwa laporan realisasi anggaran belanja Desa Melati 2 meliputi target belanja dan realisasi belanja cenderung meningkat dari tahun 2013 - 2017 dari segi yang ditargetkan maupun yang terealisasi. Pendapatan daerah Desa Melati 2 terdiri dari 3 sumber yaitu :

- a. ADD adalah Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari

Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten yang kemudian disalurkan ke tiap – tiap desa atau kelurahan,

- b. Dana Desa yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

### **1. Pengukuran Efisiensi**

Efisiensi adalah salah satu cara dalam mengukur kinerja pada organisasi sektor publik. Kinerja pemerintah daerah dalam organisasi sektor publik tidak bisa dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan, tetapi juga mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama – sama.

Peraturan pemerintah No.8 tahun 2006 tentang tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah menyebutkan bahwa kinerja adalah salah satu keluaran atau hasil dari suatu kegiatan atau program yang hendak di laksanakan atau yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Efisiensi merupakan pencapaian keluar (*output*) yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan keluaran/masukan (*output/input*) yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui tingkat efisiensi dari Desa Melati 2 adalah membandingkan antara target belanja dan realisasi belanja.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{output}}{\text{input}} \times 100\%$$

Ketentuan dan indikator efisiensi menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996

- a) Jika hasil pencapaian Antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.
- b) Jika hasil pencapaian Antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien.
- c) Jika hasil pencapaian Antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien..
- d) Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

Perhitungan tingkat efisiensi Desa Melati 2 dari tahun 2013 sampai dengan 2017 adalah sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2013} = \frac{\text{Rp } 156,229,671}{\text{Rp } 156,229,671} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{\text{Rp } 156,229,674}{\text{Rp } 156,229,674} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{Rp } 1,039,218,452}{\text{Rp } 1,039,218,452} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp } 1,249,020,979}{\text{Rp } 1,249,020,979} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{Rp } 1,743,569,428}{\text{Rp } 1,743,569,428} \times 100\% = 100\%$$

Pengukuran tingkat efisiensi dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tahun	Target Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	Tingkat Efisiensi	Kriteria
2013	Rp156,229,671	Rp156,229,671	100%	Tidak efisien
2014	Rp156,229,674	Rp156,229,674	100%	Tidak efisien
2015	Rp1,039,218,452	Rp1,039,218,452	100%	Tidak efisien
2016	Rp1,249,020,979	Rp1,249,020,979	100%	Tidak efisien
2017	Rp1,743,569,428	Rp1,743,569,428	100%	Tidak efisien

Sumber: Arsip data Desa Melati 2 Perbaungan

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah Desa Melati 2 tahun anggaran 2013 - 2017 tidak mengalami perubahan kriteria. Setiap tahunnya tergolong dalam kriteria tidak efisien. Pada tahun 2013 Pemerintah Desa Melati 2 mendapatkan kriteria tidak ekonomis dikarenakan target anggaran belanja dengan realisasinya sama yaitu sebesar Rp156,229,671 yang menyebabkan hasil perbandingan 100% sehingga mendapatkan kriteria tidak efisien. Pada tahun 2014 target anggaran belanja sebesar Rp156,229,674 dan realisasinya sebesar Rp156,229,674 tidak berbeda dengan tahun sebelumnya. Dan mendapatkan kriteria tidak efisien. Pada tahun 2015 target anggaran belanja sebesar Rp1,039,218,452 dan realisasinya Rp1,039,218,452 mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya. Namun tetap saja masih dalam kriteria tidak efisien. Pada tahun 2016 target anggarannya Rp1,249,020,979 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya namun tetap dalam kriteria tidak efisien karena realisasi anggaran belanjanya juga sama. Pada tahun 2017 Target anggarannya adalah Rp1,743,569,428 dan realisasinya pun sama sehingga dapat dikategorikan tidak efisien.

Anggaran belanja Desa Melati 2 tergolong dalam kriteria tidak efisien dikarenakan Antara perbandingan target dengan realisasi mencapai 100% atau

dengan kata lain Antara target dan realisasi jumlahnya sama. dan hal tersebut terjadi selama lima tahun berturut – turut dari mulai tahun 2013 – 2017. Padahal setiap tahunnya jumlah dari target dan realisasi selalu naik. Namun tetap menjadi sebuah permasalahan antara target dan realisasi karena jumlahnya selalu sama sehingga menjadi salah satu penyebab anggaran masuk dalam kriteria tidak efisien.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penyebab Anggaran Belanja Menjadi Tidak Efisien**

Dari penelitian yang telah dilakukan maka terlihat bahwa perhitungan dengan teori yang ada berlawanan dimana dikatakan menurut Indra Bastian bahwa organisasi sektor publik harus memenuhi kriteria *value for money* yang diantaranya efisiensi, efektifitas dan ekonomis.

Kemampuan pemerintahan desa dalam mengelola anggaran berhubungan dengan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan pemerintah dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik, akuntabilitas bukan sekedar kemampuan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif. *Value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak hanya dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama – sama. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu : ekonomis (hemat dan cermat)

dalam pengadaan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. (Nurmala Sari, dkk, 2015, hal 17)

Setelah dianalisis Dengan indikator pengukuran efisiensi yang ada, Desa Melati 2 tidak pernah masuk dalam kriteria efisien dikarenakan Antara target dan realisasi selalu sama. Padahal efisiensi sangat penting dalam salah satu penilai kinerja pemerintahan.

Berdasarkan analisa yang ada penyebab belum terjadinya anggaran belanja yang efisien pada Desa Melati 2 adalah:

- a. Desa masih menerima anggaran desa yang berasal dari ADD (Alokasi Dana Desa) yang berasal dari pemerintah kabupaten dan dana desa yang berasal dari pusat dan desa belum bisa memakai anggaran yang berasal dari ADD dan dana desa secara berlebihan
- b. Sistem yang berlaku dalam menyusun RAB ( Rencana Anggaran Desa) disimpulkan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) yang disesuaikan dengan pagu. Yang dimaksud oleh pagu adalah dana yang turun dari pemerintah. Pagu tersebut menjadi landasan terbentuknya PABDes ( Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa) yang dari tahun yang sekarang ke tahun selanjutnya. Misalnya untuk merancang APBdes untuk tahun 2018, maka pada oktober 2017 PABDes disusun sehingga menjadi RAPBDes. RAPBDes masih menggunakan pagu tahun yang berjalan kemudian setelah pagu turun ditahun 2018 maka pemerintah desa membuat

proposal untuk PAPBDes 2018. PAPBdes dibentuk karena adanya perubahan volume pembangunan dalam desa itu sendiri. Dan realisasi sama dengan 0 dikarenakan setelah pagu turun maka desa baru membuat proposal berdasarkan pagu yang ada.

- c. Belum adanya PADes (Penghasilan Asli Desa) atau BUMdes (Badan Usaha Milik Desa) yang akan membantu desa lebih mandiri dalam menyusun anggaran pendapatan desa itu sendiri. Adanya PADes akan membantu desa dalam memperkirakan Anggaran yang masuk dan Anggaran yang keluar karena desa akan mempunyai penghasilan sendiri.

## **2. Upaya yang Dilakukan Pemerintah Desa Melati 2 Perbaungan Dalam Memperoleh Kriteria Efektifitas.**

- a. Meningkatkan sumber pendapatan daerah khususnya sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam meningkatkan Pendapatan Daerah dengan cara mengelola dan memanfaatkan hasil kekayaan daerah agar mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat yang salah satunya membangun BUMDes yang akan menjadi PADes bagi Desa Melati 2 sehingga desa memiliki pendapatan sendiri sehingga tidak perlu menyesuaikan proposal dengan pagu yang ada sehingga realisasi anggaran tidak sama dengan 0. Yang dimana BUMDes sedang dalam tahap pembangunan dan akan beroperasi di satu atau dua tahun mendatang.
- b. Meminimalisir dan menekan belanja operasi dan lebih meningkatkan belanja modal agar kualitas pelayanan yang diberikan seimbang dengan belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mendapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengukuran berdasarkan konsep efisiensi pada anggaran belanja Desa Melati 2 Perbaungan masih termasuk belum sepenuhnya baik, karena termasuk dalam kriteria tidak efisien karena antara target anggaran belanja dan realisasi sama dengan 0 atau dengan kata lain jumlah antara target dan realisasi sama jumlahnya, serta masih ada kriteria yang belum terpenuhi dalam Desa Melati 2 yang menyebabkan kendala dalam pengukuran efisiensi tersebut. Dan dalam indikator pengukuran target dan realisasi termasuk kedalam 100 % dimana itu tidak efisien. Beberapa penyebab ketidak efisienan anggaran belanja yang dialami Desa Melati 2 adalah sistem yang berlaku dalam menyusun RAB ( Rencana Anggaran Desa) disimpulkan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) yang disesuaikan dengan pagu, Desa yang harus menyesuaikan anggaran yang berasal dari pemerintah pusat habis terpakai atau sama dengan 0, dan desa juga belum memiliki PADes (Penghasilan Asli Desa) atau BUMdes (Badan Usaha Milik Desa) yang akan membantu desa lebih mandiri dalam menyusun anggaran pendapatan desa itu sendiri. Adanya PADes akan membantu desa dalam memperkirakan anggaran yang masuk dan anggaran yang keluar karena desa akan mempunyai penghasilan sendiri.

2. Pemerintah sebaiknya memperhatikan hal – hal yang meningkatkan efisiensi anggaran belanja Desa Melati 2 antara lain mengelola dan memanfaatkan hasil kekayaan daerah dan menampungnya ke dalam BUMDes sehingga dapat memperoleh PADes sehingga desa memiliki pendapatan sendiri yang akan membuat pemerintah desa tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran yang berasal dari pusat, meminimalisir dan menekan belanja operasi dan lebih meningkatkan belanja modal agar kualitas pelayanan yang diberikan seimbang dengan belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Melati 2 Perbaungan seharusnya menggunakan konsep efisiensi dari awal agar untuk mengetahui kinerja pemerintahan itu sendiri dari segi anggaran belanja agar dapat menjadi landasan untuk menyusun anggaran pada tahun yang mendatang.
2. Pemerintah sebaiknya menyegerakan pembangunan BUMDes agar mempunyai PADes sendiri sehingga desa lebih mandiri dan dapat menyiapkan serta merencanakan anggaran sendiri dengan maksud agar Antara target dengan realisasi tidak sama dengan 0 dan dapat mengelola anggaran dengan lebih efisien.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisis kinerja keuangan organisasi sektor publik. Dengan menggunakan konsep efektifitas atau bahkan lebih luas lagi seperti *value for money* dan bisa

menggambarkan keadaan keungan daerah yang sebenarnya. Serta bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar bisa memperluas lingkup wilayah penelitian tidak hanya mengambil 1 tempat penelitian saja agar bisa menjadi perbandingan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra(2015). *Akutansi Untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta. Erlangga.
- Bastian Indra, Soepriyanto Gatot (2002). *Sistem Akutansi Sektor Publik: Konsep untuk Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian Indra (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga
- Halim Abdul, Kusufi Syam (2012). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akutansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Julita (2012). “*Analisis Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja*”
- Mardiasmo (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Andi
- Nurmala Sari, Eka dkk. (2015). *Akutansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Medan: Perdana Publishing.
- Nordiawan Deddy, Hertianti Ayuningtyas (2011). *Akutansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Renyowijoyo Muindro (2008). *Akutansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pangkey Immanuel, Pinatik Sherly (2015). “*Analisis Efektifitas dan Efisiensi*”
- Renyowijoyo Murindro (2012). *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba Edisi3*. Jakarta: Mitra Wacana Media

*Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara*". Jurnal EMBA, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol. 3 No.4, Desember 2015.

*Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara*". Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Rampengan Melania, dkk (2016). "*Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado*". Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol. 16 No. 3, s2016.

Sumunge Ariel Sharon . "*Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan*". Jurnal EMBA, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syam Ratulangi Manado. Vol. 1 No. 3, September 2013.

Untari Rusita (2014). "*Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang*". Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro.

Wiratna Sujarweni (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press